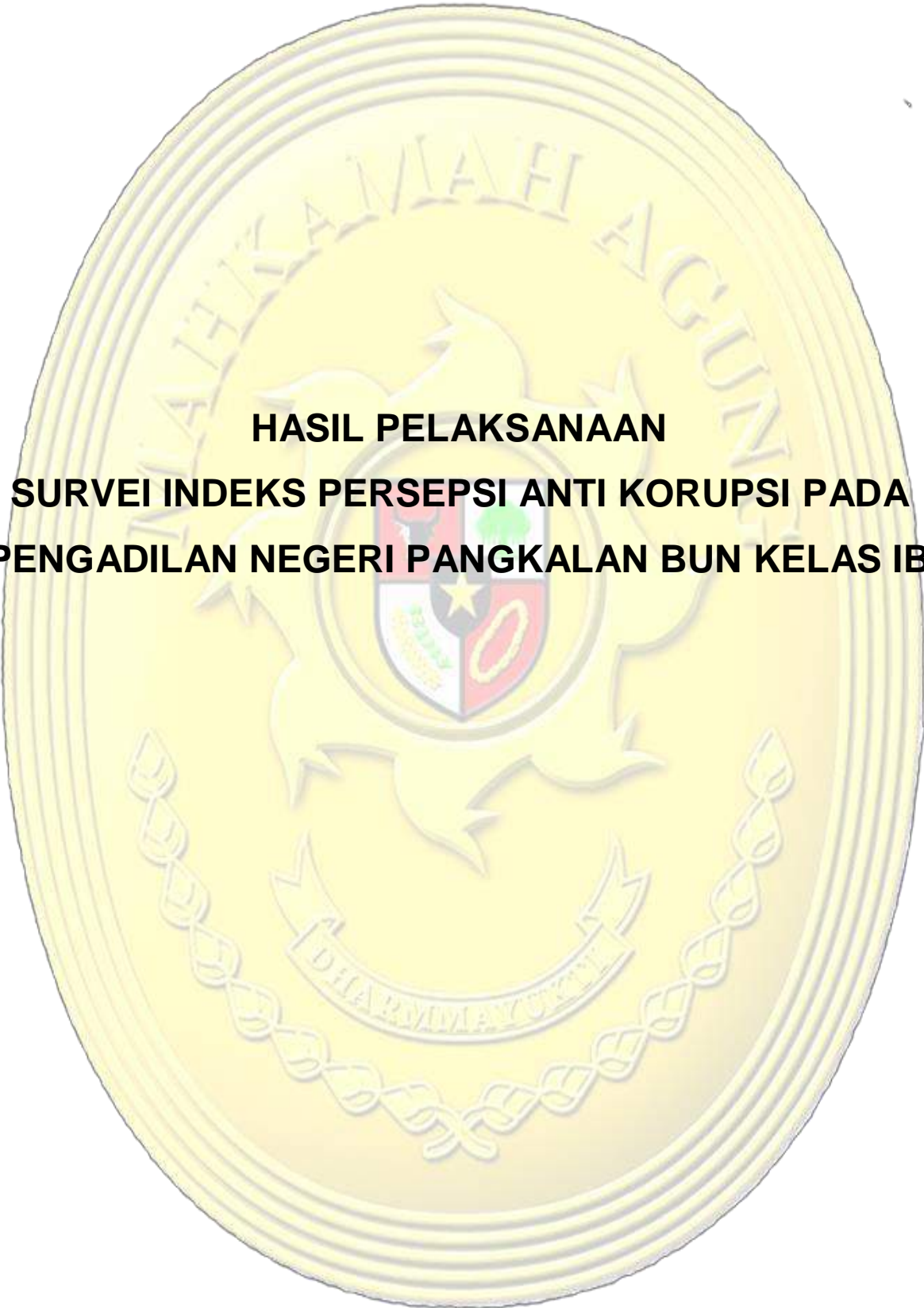


LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

**Periode Januari s/d Maret
Tahun 2022**

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

**Periode Januari s/d Maret
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB periode Januari 2022 s/d Maret 2022. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta untuk memenuhi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 tanggal 13 April 2016 dan Nomor 608/DJU/PS02/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB.

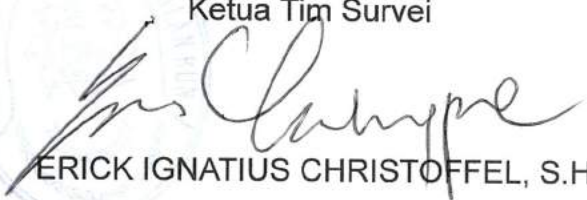
Laporan hasil survei ini berisikan elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Laporan ini memberikan data dan informasi tentang tingkat Indeks Persepsi Anti Korupsi yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan utama pada masing-masing Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 04 April 2022

Ketua Tim Survei


ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Rencana Kerja	2

BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian	4
1. Populasi dan Sampel	4
2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisa	4
3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
4. Teknik Analisa Data	5
5. Tahapan Pelaksanaan	6

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden.....	8
1. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
2. Pekerjaan Responden	8
3. Domisili Responden	9
4. Kelompok Usia Responden	9
5. Layanan yang Digunakan	9
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	10
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	10
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	10
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	10
4. Indikator Transparansi Biaya.....	11
5. Indikator Biaya Tambahan.....	11
6. Indikator Hadiah, mendapat.....	11
7. Indikator Transparansi Pembayaran.....	11
8. Indikator Percaloan.....	12
9. Indikator Perbuatan Curang.....	12
10. Indikator Transaksi Rahasia.....	12
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	12

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	16
Rekomendasi.....	16
Pengantar Kuisisioner IPK.....	18

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Pelaksana
- b. Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- c. Penyiapan Bahan
- d. Kuesioner.
- e. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- f. Kelengkapan peralatan.
- g. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- h. Jumlah Responden.
- i. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- j. Penyusunan Jadwal
- k. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengolahan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh Responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya diolah untuk membuat laporan.

3. Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas Responden.

4. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam beberapa periode semester.

BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan datang ke kantor dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu antara Januari s/d Maret 2022. Selanjutnya data diolah untuk laporan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Pengawas (Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan Responden, sekaligus memastikan apakah Responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. **Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- b. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- c. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati

nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

5. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan

9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan SMA dan S-1 yaitu masing-masing 27 dan 15 responden (60/32 %).

Tabel 4. Tingkat pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	0
2	SD	0
3	SMP	0
4	SMA	27
5	D-1	1
6	D-2	0
7	D-3	0
6	S-1	15
7	S-2	3
8	S-3	0
Total		46

2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan Responden, menunjukkan bahwa diketahui sebanyak 23 Responden (50 %) pengguna layanan teridentifikasi berprofesi sebagai POLRI.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah
1	ASN / PNS	3
2	TNI	0
3	POLRI	23
4	Swasta	0
5	Wirausaha	0

6	Tenaga Kontrak	9
7	Lainnya	11
Total		46

3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, Responden paling banyak berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 45 Responden (98 %).

Tabel 6. Domisili Responden

NO	DOMISILI	JUMLAH
1	Kalimantan Tengah	45
2	Sulawesi Tengah	1
Total		46

4. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun sebanyak 26 Responden (56,52 %).

Tabel 7. Usia Responden

NO	USIA	JUMLAH
1	18-28 Tahun	26
2	29-39 Tahun	12
3	40-49 Tahun	5
4	50-59 Tahun	2
5	60-69 Tahun	1
Total		46

5. Layanan yang digunakan

Layanan Pidana menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh Responden, yaitu sebanyak 30 Responden (65 %).

Tabel 8. Jenis Layanan yang Dipergunakan Responden

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
1	Perdata	7
2	Pidana	30
3	Hukum	9
4	Umum	0
	Total	46

B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang, yang keseluruhannya menilai petugas melayani sesuai prosedur yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Bersih dari Manipulasi Peraturan.

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa menyalahgunakan jabatan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang, yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tanpa menjual pengaruh. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

4. Indikator Transparasi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang yang keseluruhannya menilai petugas. Transparan dalam menjelaskan biaya perkara. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam hal tarif dan biaya.

5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang yang keseluruhannya menilai petugas dalam melayani tanpa meminta biaya tambahan yang sifatnya tidak resmi. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari biaya tambahan/pungli.

6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa meminta hadiah. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih karena tidak menerima hadiah yang tidak sah.

7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan selalu memberikan bukti pembayaran yang sah.

8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada praktek percaloan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dan bersih dari praktik percaloan.

9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada perbuatan curang. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak terdapat perbuatan curang kearah KKN.

10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 46 Orang menilah bahwa pelayanan tanpa adanya transaksi rahasia. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari praktik pengurusan perkara.

C. INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar **4,00**. Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **100 %**.

Tabel 9.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Data Responden

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Keterangan
1.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Januari 2022
2.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Januari 2022
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Januari 2022
4.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2022
5.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2022
6.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Januari 2022
7.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Januari 2022
8.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Januari 2022
9.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Januari 2022
10.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Januari 2022
11.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Januari 2022
12.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11 Januari 2022
13.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Januari 2022
14.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Januari 2022
15.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Januari 2022
16.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Januari 2022
17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Januari 2022
18.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Januari 2022
19.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Januari 2022
20.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Januari 2022

21.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	31 Januari 2022
22.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	31 Januari 2022
23.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	31 Januari 2022
24.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	31 Januari 2022
25.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	31 Januari 2022
26.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Februari 2022
27.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Februari 2022
28.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Februari 2022
29.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Februari 2022
30.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Februari 2022
31.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Februari 2022
32.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Februari 2022
33.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Februari 2022
34.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Februari 2022
35.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Maret 2022
36.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Maret 2022
37.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Maret 2022
38.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Maret 2022
39.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Maret 2022
40.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Maret 2022
41.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Maret 2022
42.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17 Maret 2022
43.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Maret 2022
44.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Maret 2022
45.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 Maret 2022
46.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Maret 2022
	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	
NRR Per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	4,000
IPAK Unit Pelayanan											4,00

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPAK : Indeks Persepsi Anti Korupsi

*) : Jumlah NRR IPAK Tertimbang

NRR Per RL : Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi

IPAK : 4,00

Jumlah Responden 46

Bobot

Unsur Pertanyaan

Bobot NRR Tertimbang

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Rangking Terendah & Tertinggi
Q 1	Manipulasi Peraturan	4,000	
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	
Q 3	Menjual Pengaruh	4,000	
Q 4	Transaksi Biaya	4,000	
Q 5	Biaya Tambahan	4,000	
Q 6	Hadiah	4,000	
Q 7	Tranparansi Biaya	4,000	
Q 8	Percaloan	4,000	
Q 9	Perbuatan Curang	4,000	
Q 10	Transaksi Rahasia	4,000	
JUMLAH		40,000	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 4,00 atau pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun yang digunakan untuk perancangan ruang lingkup survey pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berdasarkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Berdasarkan Data Yang Dirangkum Untuk Survei Triwulan I Tidak Ada Nilai Terendah, Dikarenakan Semua Responden Memberikan Nilai 4,00 Terhadap Semua Indikator Yang Ditanyakan Sehingga Dalam Survei Triwulan I Ini Memperoleh Hasil Sesuai Yang Diharapkan.

B. Rekomendasi

Dikarenakan Semua Indikator Pertanyaan Mendapatkan Nilai 4.00, Maka Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode Januari s/d Maret 2022 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh peningkatan penilaian dari masyarakat dengan nilai 4,00 atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Agar Pada Survei Triwulan II Mendapatkan Hasil Seperti Triwulan I Ini.

Akhir kata tidak ada rekomendasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini dikarenakan 10 kategori survey PN Pangkalan Bun masih dalam kategori sangat baik. Namun ada beberapa poin yang disampaikan yaitu :

1. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan Meskipun Pada Survei Triwulan I Semua Indikator Mendapatkan Nilai 4.00.
2. Hasil survei ini dapat menjadi bahan/data acuan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun dalam mengambil kebijakan yang konstruktif kedepannya.
3. Survei ini hendaknya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah Responden yang semakin banyak dari setiap periode survei, agar supaya data yang didapatkan menjadi lebih valid dan representative.



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Telepon : (0532) 21014 – 21179
Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Website: www.pn.pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor : W16-U3/01/PB.01/IV/2022

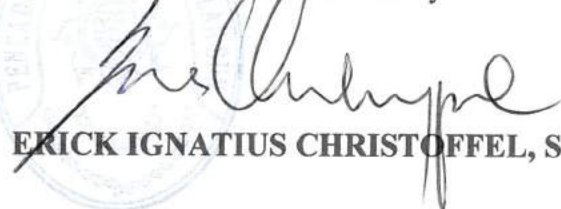
Para Pengguna Pengadilan yang terhormat,

Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengguna pengadilan sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Pangkalan Bun “PRIMA” Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel untuk mewujudkan institusi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mengetahui kondisi riil pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saat ini terkait dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadakan Survei Persepsi Korupsi dengan melibatkan para pengguna pengadilan sebagai Responden. Mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr(i) para pengguna pengadilan berkenan mengisi kuesioner yang kami edarkan dengan sejujurnya dan apa adanya. Jawaban Bapak/ibu atas pertanyaan di dalam kuesioner ini hanya semata-mata untuk meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, 01 April 2022
Koordinator Survey




ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Dasar Hukum:

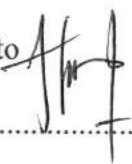
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

PETUGAS PELAKSANA :

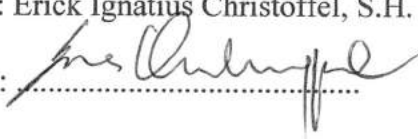
1. Petugas :

- Nama : Hiskia J. A.
- Tanda Tangan : 
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama : Hariyanto 
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama : Erick Ignatius Christoffel, S.H.
- Tanda Tangan : 
- Tanggal Pelaksana :



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201



**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
TRIWULAN I
Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022**

<p>SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI NILAI INDEKS</p> <p>4,00 / 100%</p> <p>KATEGORI "SANGAT BAIK"</p>	<p>Jumlah : 46 Responden</p> <p>Jenis Kelamin :</p> <ul style="list-style-type: none">- Laki-laki 36- Perempuan 10 <p>Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak / Belum Sekolah : 0- SD : 0- SMP : 0- SMU : 27- D-1 : 1- D-2 : 0- D-3 : 0- S-1 : 15- S-2 : 3- S-3 : 0 <p>Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none">- PNS : 3- TNI : 0- POLRI : 23- SWASTA : 0- WIRAUSAHA : 0- TENAGA KONTRAK : 9- LAINNYA : 11
--	---

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



Koordinator Tim Survei

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2022

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama :(boleh inisial atau tidak diisi)

2. Instansi/Perusahaan :

3. Umur (Tahun) :

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)

5. Pendidikan terakhir :

1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)

2. SD 6. Sarjana (S1)

3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)

4. SLTA

5. Pekerjaan Utama :

1. PNS 5. Petani/Nelayan

2. TNI/Polri 6. Pedagang

3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa

4. Wiraswasta 8. Lainnya

6. Domisili/Tempat Tinggal :

7. Jenis Layanan yang Digunakan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

Kuisisioner IPK :

No	Pertanyaan	Jawaban	Nilai
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak Sesuai Prosedur b. Jarang Sesuai Prosedur c. Sering Sesuai Prosedur d. Selalu Sesuai Prosedur	1 2 3 4
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan	1 2 3 4
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
5.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4

Berdasarkan Survei Elektronik yang digunakan pada periode 01 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk

